



Analisis Peran Kementerian Desa dalam Mewujudkan Kemandirian Desa di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020-2024

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Achmad Zaidan Rafisyah Universitas Muhammadiyah Jakarta zzaidan851@gmail.com Audrey Esa Maulida Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal audreyesa28@gmail.com Mawar Universitas Muhammadiyah Jakarta Mawar@umj.ac.id	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 3, December 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Rafisyah, A. Z., Maulida, A. E., & Mawar. (2025). Analisis Peran Kementerian Desa dalam Mewujudkan Kemandirian Desa di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020-2024. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3), 5313-5319.

Abstrak

Peran Kementerian Desa dalam mewujudkan desa mandiri merupakan salah bentuk upaya dari pemerintah untuk menaikkan perekonomian yang berada di desa khususnya desa yang berada di kabupaten Lampung Utara yang dimana jumlah desa yang berada di daerah tersebut berjumlah 232 desa dengan rincian 152 desa berkembang, 75 desa maju dan 5 desa mandiri. Banyaknya status desa berkembang ini menjadi masalah utama terkait dengan peran yang diberikan oleh Kementerian Desa. Peran yang diberikan oleh Kementerian Desa disini yaitu pendamping desa, pemberdayaan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pengembangan inovasi desa, ketiga peran ini sangat vital untuk mewujudkan desa mandiri di kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori *new public service* dan memperoleh hasil yaitu peran yang diberikan oleh Kementerian Desa sudah diterapkan di desa yang berada di kabupaten Lampung Utara melalui beberapa program dari Kementerian Desa yang dapat membuat desa yang berada di Kabupaten Lampung Utara menjadi mandiri

Kata Kunci: Administrasi, Tata Usaha, Surat Menyurat, Kementerian Keuangan.

Abstract

The role of the Ministry of Villages in realizing independent villages is one of the government's efforts to improve the economy in villages, especially villages in North Lampung Regency, where the number of villages in the area is 232 villages, with details of 152 developing villages, 75 advanced villages and 5 independent villages. The large number of developing village statuses is a major problem related to the role given by the Ministry of Villages. The roles given by the Ministry of Villages here are village facilitators, empowerment through Village-Owned Enterprises (BUMDes) and development of village innovation, these three roles are very vital to realizing independent villages in North Lampung Regency. This study uses a descriptive qualitative method using the theory *new public service* and obtained results, namely the role given by the Ministry of Villages has been implemented in villages in North Lampung Regency through several programs from the Ministry of Villages which can make villages in North Lampung Regency independent.

Key Words: The Role of the Ministry of Villages, Village Facilitators, Empowerment Through BUMDes, Village Innovation Development

A. Pendahuluan

Dalam mewujudkan sebuah otonomi daerah, desa diberikan otoritas agar dapat membangun daerahnya sendiri menjadi sebuah daerah yang lebih mandiri. Pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa juga merupakan sebuah aspek yang dinilai penting dikarenakan menjadi sebuah indikator yang dapat dibidang strategis agar dapat menentukan kesejahteraan dari masyarakat yang berada di desa tersebut (Suswanto et al, 2020).

Hal ini sesuai dengan asas yang dianut oleh Indonesia yaitu asas demokrasi dikarenakan dalam melaksanakan sebuah pembangunan di sebuah daerah terutama di desa, keikutsertaan masyarakat sekitar juga penting untuk mendukung proses pembangunan tersebut tetapi dengan adanya hambatan yaitu kurangnya pengembangan dari segi kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh desa menjadikan masyarakat yang berada di desa perlu mendapatkan pemberdayaan. Melalui pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu cara untuk membangun kualitas sumber daya manusia yang ada di desa dengan menggali kompetensi, kreativitas, serta daya pikir yang ada dalam individu melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan dan lain-lain (Laha & Dorohugi, 2021).

Dalam hal ini desa yang berada di Kabupaten Lampung Utara sesuai dengan data yang diperoleh yaitu terdapat total 232 desa yang berada di kabupaten Lampung Utara yang dimana terdapat 152 desa yang berstatus berkembang, 75 desa yang berstatus maju dan 5 desa yang berstatus mandiri hal ini menjadi perhatian terkait dengan peran dari Kementerian Desa dalam mewujudkan desa yang mandiri di kabupaten Lampung Utara dengan sejumlah peran yang dilakukan oleh Kementerian Desa seperti membentuk bumi desa dan lain sebagainya untuk mewujudkan desa mandiri di kabupaten Lampung Utara.

Dengan banyaknya jumlah desa berkembang yang ada di kabupten Lampung Utara maka peran dari Kementrian Desa sangat diperlukan untuk membangun desa yang ada di Lampung Utara menjadi mandiri. Kemandirian desa juga tidak luput dari pengawasan Kementerian desa yang memiliki peran sebagai pembangun dan pemberdaya desa yang masih dikategorikan desa yang belum mandiri. Program yang dimiliki Kementerian desa antara lain yaitu dana desa, desa digital, bumi desa, koperasi desa, pendamping desa, peningkatan kapasitas masyarakat, sarana dan prasarana desa, dan ketahanan pangan desa.

Dalam program tersebut Kementerian Desa berupaya mewujudkan desa yang mandiri. Dalam kasus ini desa berkembang yang berada dalam Kabupaten Lampung Utara yang menjadi objek sebagai upaya yang dilakukan oleh Kementerian Desa dalam mewujudkan kemandirian desa melalui program yang sudah dirancang untuk membangun kemandirian desa.

Dalam membangun kemandirian desa peran dari Kemeterian Desa sangat penting dikarenakan perlu adanya kebijakan dan regulasi untuk membangun desa mandiri, menyalurkan serta mengawasi dana desa, menciptakan kapasitas sumber daya manusia desa, mendorong inovasi dan bumi desa, monitoring serta evaluasi dalam pembangunan desa dan menumbuhkan kemandirian desa melalui program pengembangan desa mandiri, program inovasi desa, desa cerdas, pemberdayaan ekononi masyarakat desa dan transformasi bumi desa menjadi badan hukum. Melalui peran Kementerian Desa, pembentukan kemandirian desa di

kabupaten bogor menjadi terorganisir dengan segala permasalahan yang ada dibantu dengan solusi dengan tujuan untuk memberikan langkah solutif terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh desa yang berada di kabupaten bogor.

Adanya peran Kementerian Desa dalam membangun kemandirian desa di Kabupaten Lampung Utara juga menjadi alasan peneliti tertarik untuk mengetahui peran dari Kementerian Desa terhadap pembangunan kemandirian desa di Kabupaten Lampung Utara dengan indikator pencapaian program yang ada dalam Kementerian Desa untuk membangun desa mandiri.

Dalam penelitian ini peneliti berfokus kepada peran yang diberikan oleh Kementerian Desa dalam mewujudkan desa mandiri yaitu pendamping desa, pemberdayaan melalui Badan Usaha Milik Desa dan pengembangan inovasi desa. Pendamping desa merupakan jabatan yang berada dibawah Kementrian Desa, yang memiliki tujuan untuk melakukan sebuah pembangunan terhadap desa yang masih tertinggal maupun bekerkembang untuk menjadi desa yang mandiri (Laha&Doruhugi, 2021).

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut perlu adanya bantuan dari Pendamping Lokal Desa yang mempunyai kedudukan di desa, pendamping desa ini memiliki tujuan dalam pemberdayaan berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 18 Tahun 2019 yang di dalamnya berisi tentang tujuan pemberdayaan melalui pendamping desa yaitu untuk meningkatkan sebuah kapasitas terkait dengan efektivitas serta akuntabilitas yang ada dalam pemerintahan desa serta pembangunan yang ada di desa, dapat direalisasikan dengan melakukan pendampingan yang skalanya intens terhadap pemerintahan desa dimulai dari merancang beberapa tahap seperti melakukan perencanaan, pelaksanaan serta melakukan evaluasi kegiatan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebuah lembaga usaha yang dimiliki oleh desa serta dikelola penuh oleh pemerintah desa dan masyarakat desa yang memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian yang berada di desa selain itu Badan Usaha Milik Desa ini dibentuk sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh desa dengan melihat dari berbagai aspek seperti kondisi dari ekonomi yang berada di desa serta kondisi sosial dan budaya dari masyarakat desa (Hardiani & Rifandi, 2023).

Dalam peran pengembangan inovasi desa disini, Kementerian Desa berperan untuk memberikan sebuah pelatihan tentang *soft skill* yang harus dimiliki oleh pemerintahan desa maupun masyarakat desa agar inovasi yang akan dijalankan oleh desa dapat dimaksimalkan oleh sumber daya manusia yang ada di desa, terutama di desa yang berada di kabupaten Lampung Utara. Banyak daerah yang hingga saat ini masih terbilang cukup tertinggal dalam memaksimalkan teknologi dan hingga saat ini juga banyak daerah yang tidak memiliki *website* sendiri (Eprilianto, et al, 2020).

Dalam penelitian yang telah dilakukan, peneliti memutuskan untuk memakai teori *new public service*. Adapun sebuah pandangan terkait dengan teori tersebut yaitu terdapat sebuah perubahan dalam pelayanan public yang dilaksanakan oleh pemerintahan dalam sebuah negara. Teori *new public service* merupakan teori tentang adanya suatu pendekatan yang dilakukan oleh pemerintahan dalam sebuah negara yang mempunyai tujuan untuk menyelenggarakan bentuk pelayanan publik serta memiliki sebuah tujuan lain yaitu dapat memberikan Solusi terhadap sebuah keterbatasan model dalam proses pelayanan publik yang masih mempunyai sifat tradisional serta dapat membantu adanya pendekatan yang mempunyai fokus terhadap khalayak (Talitha et al, 2024).

Pedekatan dalam teori *new public service* dimulai dikarenakan ada sebuah validasi mengenai peran dari masyarakat yang berperan sentral dalam tata kelola pemerintah yang bersifat demokratis. Menurut Denhard dalam (Talitha et al, 2024) dasar dari pemegang kepentingan masyarakat yang sebenarnya ialah masyarakat. Maka dari hal tersebut, aparatur negara juga wajib dalam memiliki fokus terhadap kewajiban yaitu kewajiban sebagai pelayan dari masyarakat dalam sebuah negara.

Dalam teori *new public service*, pelayanan publik yang dapat dikatakan relevan ialah pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat harus tepat waktu dan sesuai dengan banyaknya macam kebutuhan publik. Dalam teori ini juga menerangkan terkait dengan nilai dalam melakukan sebuah pelayanan kepada masyarakat yang menganut asas demokrasi Pemerintah mempunyai tugas dalam melakukan bentuk negosiasi dan membuat sebuah survey mengenai keperluan yang dibutuhkan oleh masyarakat,

oleh karena itu adanya sebuah nilai dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat sangat penting dikarenakan pemerintah menjadi tahu keadaan yang ada di dalam masyarakat serta kebutuhan seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Serta dalam teori ini diungkapkan bahwa pemerintah dalam sebuah negara harus mendahului kepentingan masyarakatnya

dikarenakan dapat membantu keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan putusan yang merupakan asas dalam negara demokrasi.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis secara deskriptif, selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur yang digunakan sebagai landasan agar fokus dari penelitian ini jelas. Dalam analisis studi literatur disini adalah penelitian yang meneliti sebuah masalah atau fenomena yang terjadi di sekitar secara ilmiah menggunakan berbagai macam refrensi yang memuat penelitian yang relevan dengan judul penelitian serta buku yang berisi tentang teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Kemudian, tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui peran Kementerian Desa dalam mewujudkan desa mandiri di Kabupaten Lampung Utara melalui program dari Kementerian Desa untuk membangun desa mandiri. Lalu untuk jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data primer dan sekunder yang dimana untuk data primer diperoleh dari kementrian desa lalu untuk data sekunder diperoleh melalui berbagai macam jurnal ilmiah yang relevan dengan judul penelitian ini. Untuk analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis model Miles dan Huberman yang dimana keseluruhan data primer yang diperoleh dianalisis dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data serta penarikan Kesimpulan (Sugiyono, 2020).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pendamping Desa

Pendamping desa merupakan jabatan yang berada dibawah Kementrian Desa, yang memiliki tujuan untuk melakukan sebuah pembangunan terhadap desa yang masih tertinggal maupun berkembang untuk menjadi desa yang mandiri (Laha&Doruhugi, 2021). Dalam melaksanakan kegiatan tersebut perlu adanya bantuan dari Pendamping Lokal Desa yang mempunyai kedudukan di desa, pendamping desa ini memiliki tujuan dalam pemberdayaan berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 18 Tahun 2019.

yang di dalamnya berisi tentang tujuan pemberdayaan melalui pendamping desa yaitu untuk meningkatkan sebuah kapasitas terkait dengan efektivitas serta akuntabilitas yang ada dalam pemerintahan desa serta pembangunan yang ada di desa, dapat direalisasikan dengan melakukan pendampingan yang skalanya intens terhadap pemerintahan desa dimulai dari merancang beberapa tahap seperti melakukan perencanaan, pelaksanaan serta melakukan evaluasi kegiatan.

Selain itu ada juga dalam tujuan pemberdayaan ini yaitu untuk meningkatkan sebuah kesadaran masyarakat desa untuk ikut serta dalam melakukan sebuah pembangunan desa yang dapat direalisasikan dengan melakukan sebuah program pemberdayaan masyarakat. Setelah itu dalam tujuan pemberdaayaan adapula tujuan untuk meningkatkan sebuah keselarasan dalam sebuah program pembangunan desa di berbagai macam sektor hal ini dapat direalisasikan seiring dengan keterlibatan secara aktif dari masyarakat desa dalam melaksanakan pembangunan desa lalu tujuan lainnya yaitu untuk mengoptimalisasi sumber daya yang ada di desa yang ditujukan untuk membentuk sebuah badan usaha desa agar desa memiliki ekonomi secara mandiri.

Pendaampingan terhadap desa bukan hanya sekedar mendampingi dalam pelaksanaan proyek yang ada di dalam desa akan tetapi pendampingan terhadap desa melakukan pendampingan seacara menyeluruh terhadap desa. Pendampingan desa dilakukan untuk melakukan sebuah pemerataan dalam pembangunan serta percepatan pembangunan yang dilaksanakan di desa). Dalam penelitian ini peran yang dilakukan oleh Kementerian Desa sebagai upaya dalam mewujudkan desa mandiri di kabupaten Lampung Utara.

salah satunya yaitu melakukan pendampingan desa yang dimaksudkan untuk menjalankan tugas serta fungsi dari Kementerian Desa untuk memaksimalkan segala bentuk potensi yang dimiliki desa yang ada di kabupaten Lampung Utara untuk di dampingi segala prosesnya agar desa yang berada di kabupaten Lampung Utara menjadi desa mandiri, dikarenakan masih banyak desa yang berada di kabupaten Lampung Utara yang memiliki status berkembang yaitu sebanyak 152 desa. Hal ini mendorong Kementerian Desa untuk melakukan pendampingan desa terhadap desa berkembang yang berada di kabupaten Lampung Utara agar status desa menjadi naik ke status desa mandiri.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini memperoleh hasil bahwasanya seluruh

desa yang berada di kabupaten Lampung Utara dalam merealisasikan tujuannya yaitu menjadi desa yang mandiri tidak terlepas dari peran Kementerian Desa. Adanya peran yang dilakukan oleh Kementerian Desa yaitu membentuk sebuah pendamping desa yang memiliki sebuah tujuan untuk mendampingi desa yang berada di Kabupaten Lampung Utara untuk melakukan sebuah proses menjadi desa yang mandiri, pendamping desa ini dinilai efektif dikarenakan pendamping desa masih berjalan di desa yang berada di kabupaten Lampung Utara.

adapun bentuk dari peran Kementerian Desa dalam mendampingi desa yaitu menjembatani desa untuk memperoleh kemandirian ekonomi dengan melakukan penyuluhan terhadap masyarakat yang ada di desa, lalu memaksimalkan sumber daya manusia yang berada di desa, serta memberikan sebuah pelatihan terhadap pemerintahan desa terkait dengan proses administrasi agar desa dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik melalui seluruh program yang menjadikan desa mandiri.

2. Pemberdayaan Melalui Bumdes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebuah lembaga usaha yang dimiliki oleh desa serta dikelola penuh oleh pemerintah desa dan masyarakat desa yang memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian yang berada di desa selain itu Badan Usaha Milik Desa ini dibentuk sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh desa dengan melihat dari berbagai aspek seperti kondisi dari ekonomi yang berada di desa serta kondisi sosial dan budaya dari masyarakat desa (Hardiani & Rifandi, 2023).

Dalam lingkup daerah yang berada di kabupaten Lampung Utara, yang daerahnya memiliki 232 desa yang ikut serta dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di tiap desa, Sebagian besar Badan Usaha Milik Desa yang berada di Kabupaten Lampung Utara masih dalam status pemula bahkan ada di beberapa desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa sudah tidak aktif yang membuat sebuah dugaan terkait dengan pengelolaan serta efektivitas dari tata Kelola Badan Usaha Milik Desa tersebut, yang menjadi sebuah tantangan terkait dengan tata kelola dari Badan Usaha Milik Desa yang berada di Kabupaten Lampung Utara yaitu sumber daya manusia yang masih rendah dan masih kurang dalam hal transparansi serta akuntabilitas dalam tata kelola Badan Usaha Milik Desa (Anora & Mawardi, 2025).

Peran dari Kementerian Desa dalam melakukan pemberdayaan melalui Badan Usaha Milik Desa ini sangat penting dikarenakan keikutsertaan dari Kementerian dapat mempercepat proses yang dilakukan untuk mewujudkan desa yang mandiri. Kementerian Desa dapat ikut serta melalui berbagai macam pemberdayaan masyarakat dengan program-program yang ada agar masyarakat khususnya daerah kabupaten Lampung Utara menjadi sumber daya manusia yang unggul dan dapat mempercepat dalam proses menuju desa mandiri.

Selain itu peran dari Kementerian Desa melalui Badan Usaha Milik Desa ini juga dapat menyusun sebuah regulasi yang akan diterapkan agar Badan Usaha ini memiliki sebuah pandangan hukum yang dapat menjadi sebuah pedoman dalam proses menjalankannya. Selain membuat regulasi Kementerian Desa juga dapat berperan sebagai penghubung dengan akses permodalan yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Desa. Peran lain dari Kementerian Desa ini juga dapat menghadirkan terkait dengan inovasi serta digitalisasi agar desa dapat mengikuti perkembangan yang ada saat ini.

Dalam penelitian ini desa yang berada di Kabupaten Lampung Utara masih ada beberapa desa yang memiliki hambatan terkait dengan pengelolaan dari Badan Usaha Milik Desa itu sendiri hingga tidak aktif kembali, maka peran Kementerian Desa disini sangat diperlukan untuk melakukan sebuah pelatihan terkait dengan tata kelola dari Badan Usaha Milik Desa itu sendiri, hal ini merupakan salah faktor pendukung desa menjadi mandiri dikarenakan perekonomian yang berada di desa dapat dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa yang akan menjadikan ekonomi desa yang mandiri dikarenakan mempunyai berbagai macam usaha di berbagai sektor tergantung dengan sumber daya alam yang dapat dikelola di desa serta sumber daya manusia yang dimiliki oleh desa.

3. Pengembangan Inovasi Desa

Dalam peran pengembangan inovasi desa disini, Kementerian Desa berperan untuk memberikan sebuah pelatihan tentang *soft skill* yang harus dimiliki oleh pemerintahan desa maupun masyarakat desa agar inovasi yang akan dijalankan oleh desa dapat dimaksimalkan oleh sumber daya manusia yang ada di desa, terutama di desa yang berada di kabupaten Lampung Utara. Banyak daerah yang hingga saat ini masih dibidang cukup tertinggal dalam memaksimalkan teknologi dan hingga saat ini juga banyak daerah yang tidak memiliki *website* sendiri (Eprilianto, et al, 2020).

Jika desa tersebut memiliki sebuah situs yang dapat diakses masal oleh masyarakat yang berada di daerah tersebut maka pemerintahan yang berada di desa berupaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat secara mudah dan dapat diakses kapan saja (Nabilah, 2017). Dalam pengembangan ini diperlukan dana desa yang memiliki sebuah tujuan agar dapat dikelola dengan sebagaimana mestinya yaitu untuk tujuan memperbaiki kualitas dari segi pelayanan terhadap masyarakat desa dengan membuat *website* yang dapat diakses masal oleh masyarakat desa juga mempermudah dari segi birokrasi yang ada di desa (Sudianing & Sandiasa, 2020).

Dalam proses menciptakan sebuah budaya terkait dengan inovasi yang dikembangkan di desa ini juga dapat menentukan kesuksesan dari desa itu sendiri (Prayitno & Subagiyo, 2018). Peran yang dilakukan oleh Kementerian Desa melalui pengembangan desa juga dapat membantu kemandirian ekonomi dari masyarakat desa itu sendiri, dikarenakan masih banyak sumber daya alam yang dapat dikelola di berbagai desa yang terletak di kabupaten Lampung Utara harapannya adalah masyarakat dapat memaksimalkan sumber daya alam tersebut yang bisa menjadi sebuah penghasilan serta menopang perekonomian yang berada di desa yang berada di kabupaten Lampung Utara.

Untuk membantu peran dari Kementerian Desa, perangkat desa yang menjalankan pemerintahan desa juga harus bersedia menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk mengembangkan inovasi tersebut karena tanpa adanya fasilitas yang disediakan oleh desa maka pengembangan inovasi ini tidak akan berjalan dengan maksimal selain itu perlu adanya transparansi kepada masyarakat desa agar memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Peran dari masyarakat juga diperlukan dalam proses pengembangan inovasi desa tanpa adanya peran dari masyarakat maka proses pengembangan terkait dengan inovasi desa akan menjadi sia-sia (Nurwanda & Badriah, 2020). Maka dari itu pemerintah desa perlu dalam meyakinkan masyarakat.

Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwasanya peran kementerian desa untuk membantu terkait dengan menghadirkan sebuah inovasi yang diperlukan untuk mewujudkan desa mandiri yang berada di kabupaten Lampung Utara telah menjalankan peran tersebut dibuktikan dengan Kementerian Desa mengadakan pelatihan *soft skill* untuk perangkat desa maupun masyarakat desa untuk mewujudkan desa digital, untuk desa digital itu sendiri yang menjadi fokus dari Kementerian Desa agar desa yang berada di kabupaten Lampung Utara dapat mengikuti perkembangan situasi saat ini.

yang dimana informasi maupun kegiatan birokrasi dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja karena adanya situs resmi yang dimiliki oleh pemerintah desa yang dapat memberikan sebuah efisiensi waktu dari masyarakat yang berada di desa tersebut maka dari itu peran yang diberikan oleh Kementerian Desa dalam pengembangan inovasi desa yang berada di kabupaten Lampung Utara harus dimaksimalkan oleh perangkat desa, selain itu Kementerian Desa juga memberikan sebuah penyuluhan terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki oleh desa yang berada di Lampung Utara.

untuk dapat dikelola menjadi sebuah produk yang memiliki nilai jual agar perekonomian yang berada di desa menjadi lebih baik dalam hal ini Kementerian Desa juga menjembatani pemerintah desa untuk mendapatkan mitra yang dibutuhkan baik itu dalam segi pendanaan maupun dari segi penjualan karena peran yang diberikan hanya untuk menjembatani pemerintah desa maka pemerintah desa harus memanfaatkan dengan semaksimal mungkin agar desa yang berada di kabupaten Lampung Utara menjadi desa mandiri.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai penelitian ini, peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa peran dari Kementerian Desa dalam mewujudkan desa mandiri di kabupaten Lampung Utara ada tiga peran yang telah dilakukan oleh Kementerian Desa yaitu pendamping desa, pemberdayaan melalui Badan Usaha Milik Desa dan pengembangan inovasi desa, ketiga peran tersebut berperan sangat aktif untuk menaikkan status desa menjadi desa mandiri dikarenakan dalam ketiga peran tersebut di dalamnya terdapat berbagai macam program guna menaikkan status desa menjadi desa mandiri.

Dari beberapa peran yang dilakukan oleh Kementerian desa yang sedang dijalani di desa yang terdapat di kabupaten Lampung Utara masih dalam proses penyesuaian dan pengembangan agar peran yang dilakukan oleh Kementerian Desa ini maksimal untuk diterapkan di desa. Ketiga Program ini telah diterapkan oleh Kementerian Desa di kabupaten Lampung Utara. Kementerian desa juga sangat berfokus untuk menjadikan desa di kabupaten

Lampung Utara menjadi desa mandiri dikarenakan masih banyak jumlah desa yang memiliki status berkembang yaitu sebanyak 152 desa.

oleh karena itu Kementerian Desa berperan untuk membantu desa untuk menjadi desa mandiri melalui kedua peran tersebut serta program unggulan yang diusulkan oleh Kementerian Desa. Ketiga peran tersebut juga diharapkan untuk dipergunakan dengan maksimal oleh pemerintah desa yang berada di kabupaten Lampung Utara karena ketiga peran ini dapat memberikan banyak benefit untuk keberlangsungan ekonomi yang ada di desa yang dapat membantu desa menjadi desa yang mandiri.

E. Referensi

- Anora, R., & Mawardi, D. R. (2025). Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Lampung Utara. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(1), 618-622.
- Eprilianto, Pradana, & Sari. (2020). Digital inovasi sektor publik: Efektivitas Kolaborasi dalam Implementasi Inovasi Desa Digital. *Jurnal EL RIYASAH*, 10(2), 127-145.
- Hardiani, M., & Rifandi, M. (2023). Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sidomoyo Kecamatan Godean, D.I Yogyakarta. *JURNAL MANEKSI*, 12(3), 211-221.
- Laha, M. S., & Dorohungi, R. (2021). Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Distrik Numfor Barat Kabupaten Biak Numfor. *Jurnal Governance and Politics*, 1(1), 27-36.
- Nabilah. (2017). Penerapan Website Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. *Publika*, 5(1), 1-6.
- Nurwanda, A., & Badriah, E. (2020). Analisis Program Inovasi Desa Dalam Mendorong Pengembangan Ekonomi Lokal Oleh Tim Pelaksana Inovasi Desa (PID) Di Desa Bangunharja Kabupaten Ciamis. *Dinamika*, 7(1), 68-75.
- Priyitno, G., & Subagiyo, A. (2018). *Membangun Desa: Merencanakan Desa dengan Pendekatan Partisipatif dan Berkelanjutan*. Malang: UB Press.
- Rivaldi, A. (2021). Optimalisasi Peran Pendamping Desa Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus di Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor). *ASCARYA*, 1(2), 241-251.
- Sudianing, N. K., & Sandiasa, G. (2020). Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Program Inovasi Desa (Di Desa Uma Anyar dan Desa Tejakula). *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, 12(2), 2-16.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suswanto, E. (2020). Peran Pendamping Desa dalam Model Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan. *Jurnal Sosial Sudirman*, 2(2), 40-60.
- Talitha, D. N., Putri, D. A., Nurlita, S., Putri, Y., & Aji, M. P. (2024). Analisis Efektivitas Program Pendampingan Desa: Upaya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Mendorong Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 6(1), 11-23.